

DIGITALISASI PARTAI POLITIK: KESIAPAN PARTAI POLITIK DI ERA DIGITAL DALAM KOMPETISI ELEKTORAL 2024

Novance Silitonga
Dosen Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Bung Karno
Email: novancesilitomga@ubk.ac.id

Abstrak

Partai politik dituntut mampu membentuk ekosistem digital yang mengandalkan kemampuan pemanfaatan teknologi digital internet dalam seluruh praktek kehidupan partai politik. Partai politik harus memiliki ruang digital untuk hidup dan berkarya. Kemampuan partai politik dalam mengartikulasi dan mengagregasi suara dan kepentingan konstituen yang berseliweran di dunia digital telah menjadi sesuatu yang begitu urgen, esensial dan menjadi sebuah keniscayaan.

Dunia digital bukan lagi momok tetapi instrumen politik yang harus dikuasai, dimanfaatkan dan diberdayakan agar eksistensi partai politik tetap ada dan berguna. Partai politik dituntut memiliki kemampuan untuk hidup di lingkungan yang sepenuhnya mengandalkan teknologi dengan berbagai aplikasi-aplikasi sebagai instrumen komunikasi dengan para konstituen yang tidak dibatasi ruang dan waktu.

Kata Kunci: Partai politik digital, Ekosistem digital, Kompetisi politik secara digital.

PENDAHULUAN

Demokrasi menuntut hadirnya partai politik sebagai sarana dan instrumen bagi setiap warga negara mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional. Partai politik satu-satunya mekanisme pencalonan seseorang dalam kompetisi elektoral untuk menduduki jabatan-jabatan publik baik di legislatif maupun di eksekutif.¹ Di era revolusi keempat yang mengagungkan pemanfaatan teknologi internet sebagai sarana penyebarluasan informasi dan komunikasi turut memberikan dampak signifikan bagi peri kehidupan partai politik sebagai salah satu kekuatan politik di Indonesia.

¹ Indonesia mengenal Dewan Perwakilan Daerah (DPD), bagian dari legislatif yang mengikuti kompetisi elektoral melalui jalur non-partai politik. Secara perseorangan, masing-masing warga negara yang memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD dapat menjadi peserta pemilu dengan daerah pemilihan sebesar provinsi. Wilayah pemilihannya lebih luas dibanding dengan wilayah pemilihan seorang calon legislatif dari partai politik.

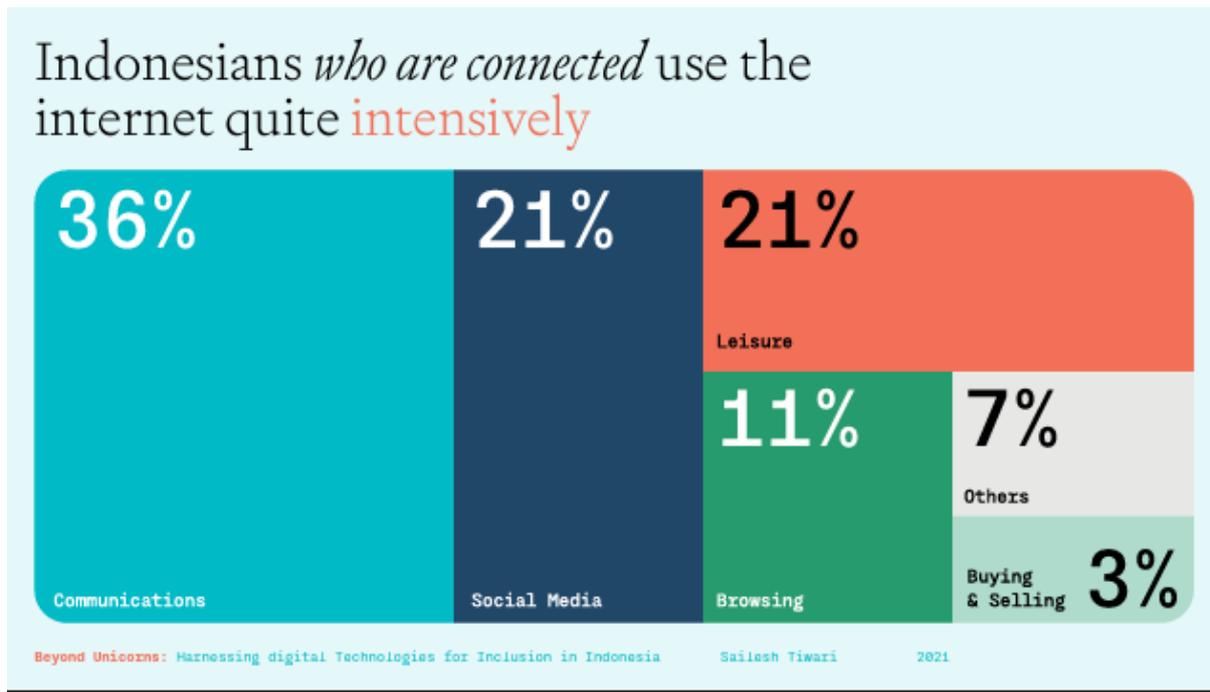
Partai politik dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat dan dinamis serta merespon segala problematika yang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat pemilih loyalis partai politik. Partai politik dihadapkan dengan sejumlah tantangan sekaligus peluang untuk berkompetisi dengan partai politik lainnya. Pertaruhannya adalah kepercayaan masyarakat. Partai politik yang tidak mampu beradaptasi mengelola kepentingan masyarakat dengan sendirinya pasti dievaluasi dalam pemilu.

Masyarakat sebenarnya telah terlebih dahulu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang diusung oleh era revolusi keempat dimana internet adalah segalanya (*internet of things*). Sulit memisahkan kehidupan masyarakat dengan kebutuhan akan penggunaan internet. Masyarakat telah hidup bersama internet sekaligus hidup di dunia realita fisik. Masyarakat cenderung berekspresi di berbagai media sosial yang terhubung dengan internet untuk menyampaikan banyak hal termasuk hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan politik seperti kandidasi partai politik dan kompetisi elektoral. Persepsi dan perilaku masyarakat berkenaan dengan politik dengan begitu mudah dapat dilihat dan dipelajari melalui sarana internet karena komunikasi, komentar, narasi, pernyataan dan berbagai pilihan dalam politik acap kali disampaikan dalam dunia internet atau dunia digital.

Dunia internet atau dunia digital adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam komunikasi politik kontemporer. Ia menjadi pusat segala komunikasi yang menawarkan sejumlah efisiensi dan efektifitas. Dunia digital pada akhirnya memberikan kita kebebasan sekaligus menguasai seluruh kehidupan manusia.² Bank Dunia melaporkan dalam *Harnessing Digital Technologies for Inclusion in Indonesian 2011* bahwa komunikasi menjadi aktivitas yang paling sering dilakukan masyarakat Indonesia ketika menggunakan internet sebagaimana ditunjukkan oleh infografis dibawah.

² Tentang ini Agus Sudibyo dalam bukunya *Jagat Digital* memberikan paparan yang luas bagaimana dunia atau jagat digital secara meyakinkan telah membebaskan kita sekaligus pula telah menguasai kehidupan kita. Lihat Agus Sudibyo, *Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan*. KPG.2021.

Persentase Pengguna Internet oleh Masyarakat Indonesia Berdasarkan Aktivitas.³



Oleh karenanya partai politik dituntut untuk mengenal, memahami dan mampu hidup dalam dunia digital sebagaimana masyarakat telah lebih dulu mengenal, memahami dan hidup dalam dunia digital. Kesiapan partai politik dalam membenahi diri mereka mengikuti arus percepatan dunia digital yang semakin cepat menentukan apakah ia dapat menjangkau masyarakat. Dunia digital telah menjadi alternatif utama bagi partai politik dalam bersentuhan dan berhubungan dengan masyarakat sebagai konstituennya. Temuan Bank Dunia tersebut seakan mengingatkan partai politik harus mampu berkomunikasi dengan konstituen dengan menggunakan jaringan internet.

Konstituen secara pragmatis lebih mudah ditemukan dalam dunia digital yang menggunakan jaringan internet. Mereka lebih terbuka di dalam dunia digital karena dunia digital menawarkan keterbukaan dan kebebasan tanpa batas. Komunikasi politik secara langsung akan terjadi jika para pemilih mengikuti kandidat atau partai politik di media sosial,

³<https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/beyond-unicorns-harnessing-digital-technologies-for-inclusion-in-indonesia>.

khususnya bagi mereka yang terkategori sebagai pemilih pemula (*first-time voters*).⁴ Mereka para pemilih pemula menggunakan informasi utama terkait politik bersumber dari platforms media sosial.⁵

Pertanyaan paling fundamental yang diajukan kepada partai politik di Indonesia adalah perihal kesiapan mereka untuk bergerak tidak saja pada tataran konvensional tradisionalistik yang mengandalkan kehadiran fisik, melainkan lebih dari itu, partai politik dituntut membentuk ekosistem digital dimana partai politik hidup dalam sebuah lingkungan yang sepenuhnya mengandalkan teknologi dengan berbagai aplikasi-aplikasi sebagai instrumen komunikasi dengan para konstituen yang tidak dibatasi ruang dan waktu.

Oleh karenanya, partai politik harus dipenuhi sumberdaya yang mumpuni yaitu sumber daya manusia dan sumber daya teknologi itu sendiri. Sumber daya manusia misalnya berkuat pada persoalan sejauh dan semampu mana partai politik mampu merekrut kader-kader yang tidak saja berorientasi politik kekuasaan melainkan juga figur-figur profesional yang terlatih dalam menciptakan ekosistem digital dimana partai politik dapat hidup. Kesiapan sumber daya teknologi mengarah pada bagaimana partai politik menyediakan perangkat, pendekatan dan teknik teknologi berbasis web dan berbasis aplikasi sebagai instrumen komunikasi politik secara online dan dikelola secara profesional dalam konteks kekinian.

Dalam kaitan inilah, partai politik perlu bertransformasi menjadi partai politik digital yang mampu mengakomodasi dan menjawab perubahan yang diusung oleh era revolusi keempat yang berkarakter digital. Indonesia dengan geografis yang sangat luas dan jumlah penduduk yang besar menambah pentingnya kehadiran partai politik digital. Partai politik

⁴ Jakob Ohme, *When digital natives enter the electorate: Political social media use among first-time voters and its effect on campaign participation*, Routledge, Journal of Information Technology & Politik, hal.119.

⁵ Jeffrey Gottfried and Elisa Shearer, *News Use Across Social Media Platforms 2016*, Pew Research Center. Disebutkan bahwa pada tahun 2016, 62 persen remaja di Amerika Serikat yang juga merupakan pemilih pemula adalah pengguna media sosial. Lihat [News Use Across Social Media Platforms 2016 | Pew Research Center](#).

digital memungkinkan fungsi partai politik sebagai artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat dapat berjalan secara maksimal di tengah masyarakat Indonesia yang sudah terdigital pula.

PARTAI POLITIK DIGITAL: PAPARAN TEORITIS PAOLO GERBAUDO

Kehadiran partai politik digital erat kaitannya dengan kecenderungannya dengan demokrasi online. Perihal partai politik digital, Paolo Gerbaudo dalam bukunya *The Digital Party, Political Organization and Online Democracy* menjelaskan bagaimana kebangkitan partai politik digital. Partai digital merupakan template organisasi baru yang terlihat di sejumlah formasi politik baru yang telah dibuat dalam beberapa tahun terakhir.⁶ Gerbaudo menjelaskan bahwa kemunculan partai politik digital dapat dilacak dari hadirnya partai-partai *pirate*⁷ atau partai-partai bajak laut khususnya di negara-negara Eropa Utara, bentuk-bentuk populis sayap kiri seperti Partai Politik *Podemos* di Spanyol dan partai sayap kiri Perancis, *La France Insoumise*, partai buruh sayap kiri *Corbyn's Labour Party* di Inggris dan *Five Star Movement* di Italia.⁸ Selanjutnya Gerbaudo menjelaskan bahwa meskipun manifestasi partai-partai ini berbeda satu dengan yang lainnya tetapi paling tidak punya kesamaan dalam cara mereka menyampaikan politik baru dengan didukung oleh teknologi digital.⁹

Lebih jauh dalam bukunya ini Gerbaudo menyebutkan beberapa karakteristik dari partai politik digital.¹⁰ Pertama, penggunaan sistem awan atau *cloud* dalam setiap infrastruktur fisik misalnya kantor atau *headquarters*. Partai politik digital hanya bisa diakses melalui perangkat virtual. Ia kehilangan kehadiran fisiknya. Kedua, partai politik digital merupakan

⁶ Paolo Gerbaudo, *The Digital Party, Political Organization and Online Democracy*, Pluto Press, 2009.hal.4.

⁷ Partai Pirate atau Partai Bajak Laut adalah label yang digunakan oleh sejumlah partai politik di seluruh dunia yang keberadaannya mendukung hak-hak sipil, demokrasi langsung, termasuk demokrasi maya. Partai Pirate atau Partai Bajak Laut ini menuntut perlindungan data pribadi dan netralitas internet.

⁸ Gerbaudo.,op.cit.hal.4.

⁹ *ibid.*,hal.4.

¹⁰ *ibid.*,hal.79-80.

partai forum (*forum party*) seperti layaknya platform media sosial. Perdebatan-perdebatan dilakukan secara terbuka berdasarkan prinsip transparansi. Misalnya pertemuan atau rapat/meeting dilakukan secara *live-streaming* seperti yang dilakukan oleh *Five Star Movement* di Italia.

Ketiga, partai politik digital merupakan partai rintisan atau *startup party*. Sebuah bentuk organisasi yang dicirikan oleh pertumbuhan yang begitu cepat dan skalabilitas yang tinggi namun memiliki potensi kegagalan atau kematian yang tinggi pula. Partai politik digital bergantung pada para volunter dalam pengelolaannya yang ditawarkan oleh para pendukung. Oleh karenanya partai politik digital ini perlu beradaptasi dengan lingkungan yang tidak stabil dan tidak pasti.

Adaptasi partai politik digital memerlukan keterlibatan sejumlah pihak untuk membantunya dalam menjalankan aktivitas digitalnya. Bantuan pihak eksternal¹¹ akan membawa partai politik dalam berbagai kemampuan baru dan menemukan sejumlah strategi-strategi potensial khususnya dalam kampanye pemilu. Penelitian yang dilakukan oleh Katharine Dommett, Glenn Kefford dan Sam Power¹² tahun 2020 lalu menyebutkan bahwa terdapat empat fungsi utama yang diberikan pihak eksternal partai politik dalam mendukung partai politik di dunia digital.

Pertama, Fungsi Strategi. Mereka memberikan *advice* bagaimana memanfaatkan teknologi digital dengan baik dan memberikan strategi menarik data online secara menyeluruh. Kedua, Pengetahuan spesialis (*specialist knowledge*). Pihak eksternal memberikan partai politik pengetahuan khusus memahami teknologi digital secara spesifik dan kemampuan memaksimalkan penggunaan teknologi digital mengingat partai politik tidak terbiasa

¹¹ Pihak eksternal yang dimaksud adalah sejumlah pihak yang tidak memiliki kepentingan dengan partai politik selain sebatas memberi asistensi agar partai politik dapat menjalankan fungsi-fungsi strategisnya di dunia digital. Mereka yang disebut sebagai konsultan politik dan intelektual perguruan tinggi adalah pihak eksternal partai politik.

¹² Katharine Dommett, Glenn Kefford and Sam Power, *The digital ecosystem: The new politics of party organization in parliamentary democracies*, Party Politics Sage Publication.2020, hal.3.

menggunakannya. Ketiga, Kapasitas (*capacity*). Dalam hal ini, partai politik didampingi dalam mendesain kampanye media sosial dan membangun strategi pengiklanan tertentu yang dapat mentarget konstituen. Keempat, Infrastruktur. Pihak eksternal menyediakan infrastruktur kampanye untuk menyampaikan tujuan-tujuan partai.

Urgensi dari keberadaan partai digital adalah pada pertanyaan apakah partai politik digital yang lebih modern dan berbasis teknologi lebih demokratis dari partai politik tradisional?. Mengenai ini Gerbaudo tetap menjadikan *Five Star Movement* di Italia dan Pademos di Spanyol menjadi perhatiannya. Gerbaudo menggunakan “*participatory platform*” yang dimiliki oleh kedua partai politik tersebut dengan menguji berbagai fitur yang tertanam dalam platform tersebut misalnya ruang diskusi dan pengajuan proposal (usulan/gagasan), pemilihan pengurus partai (*election of party officials*) dan proses kandidasi atau pencalonan.

Five Star Movement menggunakan fitur yang mereka sebut “*lex iscritti*” atau “*lex member*”, sebuah sistem *bottom-up* dimana warga negara dapat secara langsung mengajukan undang-undang yang akan dibawa ke parlemen sepanjang proposal yang diajukan tidak bertentangan dengan program *Five Star Movement* dan memiliki perkiraan *budget* atau anggaran yang realistis.

Proposal akan di-*vote* pada periode tertentu dan apabila disetujui akan disampaikan pada perwakilan partai. Pemilihan pengurus partai dan proses kandidasi atau pencalonan untuk menjadi calon legislatif, partai digital lebih *less costly* dan memberi kesempatan lebih sering untuk melakukan konsultasi kepada para kandidat.

Untuk mengukur tingkat demokratisasi partai politik digital, Gerbaudo juga mengevaluasi tingkat inklusivitas, sentralisasi dan institusionalisasi kedua partai digital tersebut.¹³ Dalam hal inklusivitas, partai politik digital memungkinkan anggotanya intervensi

¹³ Paolo Gerbaudo, *Are digital parties more democratic than traditional parties? Evaluating Pademos and Movimento 5 Stelle's online decision-making platforms*, Party Politics, Sage Publication. 2019.

secara langsung berbagai keputusan yang dibuat partai, dimana hal ini tidak ditemukan dalam partai politik tradisional.¹⁴ Keputusan-keputusan besar dalam partai digital tersentralisasi pada pertemuan online dalam semua anggota.

Sentralisasi demikian memang memperlemah unit-unit organisasi di tingkat cabang (DPC) dan wilayah (DPW) yang bertanggung jawab dalam proses rekrutmen anggota partai.¹⁵ Secara institusi harus diakui bahwa kurangnya prinsip yang jelas dan prosedur yang transparan dalam hal manajemen konsultasi online. Para staf yang bekerja di partai politik dapat sewenang-wenang membuat komentar dan mengedit proposal/usulan/gagasan yang ada.¹⁶

Secara eksklusif Gerbaudo hendak mengatakan bahwa praktek-praktek partisipasi yang dilakukan *Five Star Movement* di Italia dan *Pademos* di Spanyol sebagai partai digital, lebih terbuka namun dengan beberapa pembatasan - pembatasan, misalnya sentralisasi dalam pembuatan keputusan-keputusan besar.

MASYARAKAT DIGITAL, PARTAI POLITIK DIGITAL DAN KOMPETISI ELEKTORAL 2024

Era digital menarik masyarakat ke dalam sebuah situasi yang sepenuhnya berbeda dari kehidupan konvensional. Masyarakat seolah dipaksa untuk ikut arus digitalisasi kalau tidak mau menjadi korban jaman dan teralienasi dari gerak hidup yang semakin cepat dan dinamis. Dalam kehidupan politik, masyarakat tak luput dari dampak yang ditimbulkan era digital. Di era digital masyarakat tidak hanya aktif secara komunikasi melainkan terlibat dalam aktivitas media sosial dan praktek jual beli jasa yang menguntungkan secara ekonomi.

¹⁴ *ibid.*,hal.9.

¹⁵ *ibid.*,hal.10.

¹⁶ *ibid.*,hal.10.

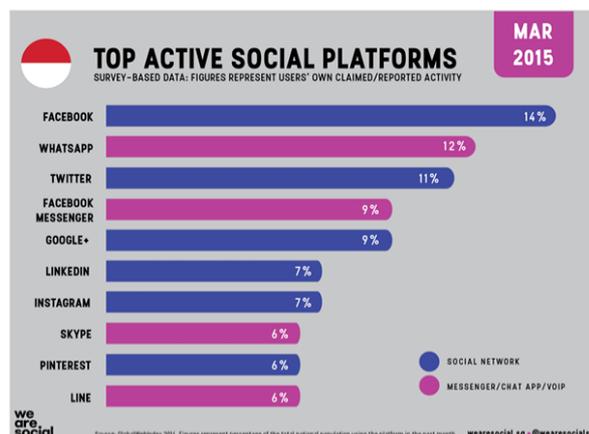
Masyarakat digital adalah suatu konstruksi yang disematkan terhadap suatu kondisi dimana penggunaan teknologi (media) digital yang semakin massif dalam berbagai ranah hidup manusia. Masyarakat digital merupakan satu masyarakat . yang hidup berdampingan dengan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang terhubung secara online. Ia berkembang seiring dengan semakin berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Interaksi yang dijalankan masyarakat digital selalu berbasis *device* atau perangkat yang terhubung dengan internet. Dalam masyarakat digital setiap orang dituntut menjadi *smart person* untuk memanfaatkan *smartphone* yang dimiliki dan sudah pula menjadi *conditio sine qua non*.¹⁷

Perhelatan pemilu di Indonesia dalam waktu dekat akan segera diselenggarakan untuk memilih Anggota Legislatif yang terdiri dari DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. Persiapan perhelatan pemilu diselenggarakan dalam situasi semakin kuatnya masyarakat digital Indonesia. Data yang dirilis oleh salah satu situs terpercaya “*we are social*” menunjukkan betapa Indonesia adalah negara pengguna internet yang sangat aktif.

Platform-platform sosial yang aktif digunakan oleh masyarakat digital Indonesia sangat beragam dan melalui platform sosial tersebut mereka membicarakan banyak hal termasuk kompetisi elektoral. Infografis dibawah menunjukkan kenyataan tersebut¹⁸.

¹⁷ Engkus Kuswarno, *Potret Wajah Masyarakat Digital Indonesia*, Jurnal Communicate Volume 1 Nomor 1. 2015, hal.52.

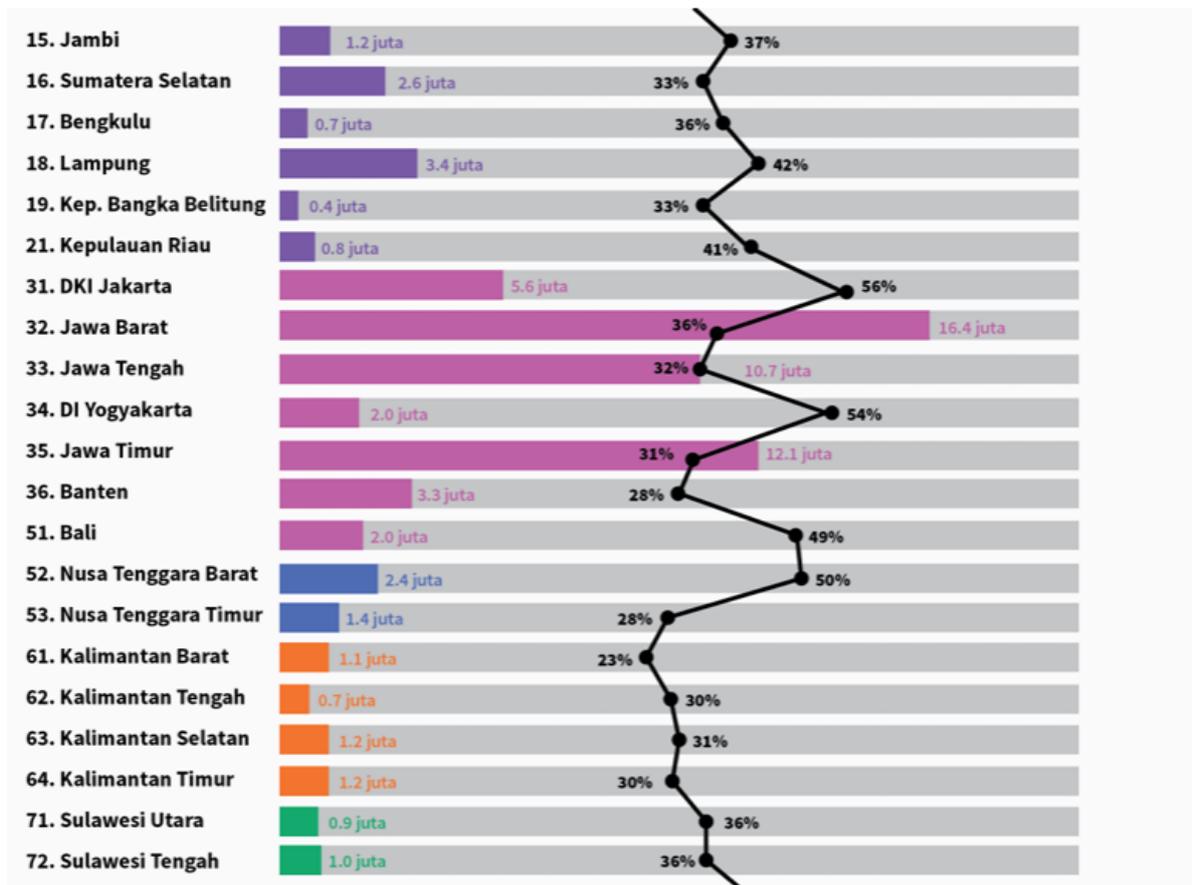
¹⁸ Infografis di ambil dari Adepina Cindy Prastika, dkk, *Isu-Isu Masyarakat Digital Kontemporer*, Center For Digital Society, Siber Kreasi dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. 2018.,hal.4-5.



Kompetisi elektoral Indonesia tahun 2024 akan didominasi oleh perdebatan-perdebatan di ruang-ruang online atau digital yang tidak memerlukan pertemuan-pertemuan fisik. Partai politik konvensional yang mencalonkan anggotanya menjadi calon legislatif dan partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan figur tertentu menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden tampaknya akan sedikit dipaksa untuk bertransformasi dan mengubah diri dalam batas tertentu menjadi partai politik digital.

Partai politik akan berkampanye untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusungnya. Ruang digital akan lebih efektif dan efisien berkampanye dibandingkan dengan ruang analog, ruang fisik dan konvensional. Tingkat keaktifan menggunakan internet berbeda di setiap provinsi. Artinya akan didapati provinsi-provinsi dimana masyarakat digital akan lebih aktif dalam bergagasan dan bernarasi bahkan berkampanye di media sosial.

Tahun 2017 Puskom UI melakukan survey terkait dengan ini. Kota-kota besar dipastikan akan berkontraksi lebih aktif karena banyak kelas menengah yang terdidik berdomisili dan kota-kota besar cenderung terakses dengan jaringan internet dengan kecepatan yang di atas standar. Infografis dibawah ini menjelaskan persebaran dan penetrasi penggunaan internet dari beberapa provinsi di Indonesia.



Ini adalah pentingnya mengapa partai politik harus tampil dengan berbagai aplikasi digitalnya dan melibatkan kalangan anak muda yang *digital native* dengan kebiasaannya mengakses teknologi digital.¹⁹ Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memunculkan “Aplikasi Solidaritas” untuk memperkuat komunikasi politik di antara mereka dan konstituen²⁰. Aplikasi ini menampung laporan tugas dan kegiatan kedewanan legislator dari PSI dan masyarakat diberikan kesempatan untuk menilai. Paling tidak aplikasi ini memungkinkan PSI untuk menjangkau masyarakat konstituen.

KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa,

¹⁹<https://theconversation.com/pemilu-2024-mengenal-partai-digital-dan-peran-pentingnya-dalam-meningkatkan-partisipasi-politik-publik-198730>.

²⁰<https://news.detik.com/berita/d-4507023/psi-luncurkan-aplikasi-solidaritas-obat-tidur-anggota-dpr>.

Pertama, Munculnya dugaan atau sebuah kesan bahwa kebutuhan partai politik untuk beradaptasi dengan teknologi digital bukan sesuatu yang urgen dan esensial. Sistem pemilu yang mengandalkan proporsional terbuka yang tidak memaksimalkan peran dan fungsi partai politik dalam kompetisi elektoral selain proses pengajuan caleg, sehingga penggunaan teknologi digital secara maksimal cenderung dilakukan oleh para kandidasi atau caleg untuk meningkatkan perolehan suara mereka. Secara formil, partai politik hampir tidak berperan dalam meningkatkan suara caleg-caleg yang diusungnya.

Kedua, penguasaan partai politik di Indonesia cenderung didominasi oleh kelompok pemilih di luar generasi millennial dan generasi Z yang *native digital* dan sangat mumpuni memanfaatkan teknologi digital. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sejauh ini dapat dikatakan sebagai partai digital yang berhasil memanfaatkan teknologi dan relatif berhasil menjangkau konstituennya.

Ketiga, partai politik digital memberi dampak pada matinya partai kader yang berbasis loyalitas. Keterbukaan dan transparansi yang diusung partai politik digital dan kecenderungan konstituen untuk terlibat membuat konstituen atau pemilih lebih memberi preferensi kepada partai politik digital.

Keempat, kehadiran partai politik digital lebih kepada merespon demokrasi langsung yang diusung oleh dunia digital yang mengandalkan internet yang membawa kebebasan berekspresi hampir tak terbatas. Sebuah demokrasi yang membayangkan interaktivitas dalam situs jejaring sosial yang menggunakan layanan *data cloud* atau sistem awan.

Kelima, secara faktual tidak semua partai politik di Indonesia telah bertransformasi menjadi partai politik digital atau setidaknya menjadi partai *hybrid* yang dapat tampil sebagai partai offline dan partai online bagi konstituen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Cindy Prastika Adepina.2018. *Isu-isu masyarakat digital kontemporer*, Siber Kreasi dan Digital Kontemporer dan Kemkominfo

Dommett, Kefford & Sam Power.2020. *The digital ecosystems: the new politics of party organization in parliamentary democracies*, Party Politic, Sage Publication.

Gerbaudo Paolo.2009. *The digital party, political organization and online democracy*, Pluto Press.

-----2019. *Are digital parties more democratic than traditional parties? Evaluating Pademos and Movimento 5 Stelle's online decision-making platform*, Party Politics, Sage Publication.

Kuswarno Engkus.2015. *Potret wajah masyarakat digital Indonesia*, Jurnal Communicate, Vol.1, Nomor 52.

Sudibyo Agus.2021. *Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan*.KPG.

Ohme Jacob, *When digital native enter the electorate: political social media use among first-time voters and its effect on campaign participation*. Routledge, Journal of Information Technology & Politics.

Situs Internet

www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/beyon-unicorns-harnessing-digital-technologies-for-inclusion-in-indonesia.

<https://news.detik.com/berita/d-4507023/psi-luncurkan-aplikasi-solidaritas-obat-tidur-anggota-dpr>

<https://theconversation.com/pemilu-2024-mengenal-partai-digital-dan-peran-pentingnya-dalam-meningkatkan-partisipasi-politik-publik-198730>.